

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Tekanan Inflasi Di Kabupaten Garut Mulai Dirasakan Pada Bulan Februari, Ditunjukkan Dengan Iph Sebesar 3,67%. Hal ini disebabkan kenaikan harga bahan pokok menjelang Bulan Ramadhan, terutama beras yang merupakan kontributor utama dalam kenaikan IPH.

Inflasi berangsur terkendali pasca periode hari besar keagamaan meskipun terjadi fluktuasi harga komoditas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pergeseran waktu tanam, pasokan domestik dan impor yang belum bisa memenuhi permintaan masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dari harga beberapa komoditas masih berada di atas harga eceran tertinggi, namun masih terkendali.

Pada Triwulan I tahun 2024 harga sejumlah kebutuhan pokok terutama komoditi pertanian merambat naik, hal ini disebabkan beberapa faktor salah satunya yaitu cuaca. Harga beras, cabe, bawang merah dan cabe rawit mengalami kenaikan hampir disemua pasar yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Sedangkan harga daging ayam dan telur ayam ras mengalami kenaikan bahkan masih tinggi sampai akhir triwulan I tahun 2024 yang disebabkan karena langkanya barang dari daerah pemasok dan juga lamanya perjalanan akibat terjadi hujan hampir setiap hari.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kabupaten Garut sebenarnya dapat dikatakan aman dalam hal permasalahan inflasi, karena seluruh kebutuhan pokok dapat terpenuhi dari dalam wilayah sendiri. Seperti sebenarnya stok cabai di wilayah Garut terbilang aman dan melimpah sampai idul fitri tapi para petani melihat tingginya harga di daerah tujuan pasokan sehingga harga cabai di Garut pun terkoreksi naik meskipun sebagai daerah penghasil karena belum ada harga acuan dari pemerintah, jadi masih berpatokan harga pasar.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Perekonomian masyarakat Garut jadi bisa lebih baik ke depan sehingga konsumsi pangan bisa lebih baik, daya beli masyarakat meningkat kembali kemudian untuk hasil pertanian juga bisa lebih ditingkatkan lagi terutama untuk subsektor pertanian dan peternakan juga menjamin ketersediaan stok cabai yang saat ini harganya meningkat signifikan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dapat menguatkan koordinasi dengan tingkat Provinsi Jawa Barat dan Pusat dalam hal penguatan ketahanan pangan, kemudian mengendalikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pokok strategis. Sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipatif untuk memastikan ketersediaan stabilitas harga bahan pokok strategis dalam kondisi sekarang.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk menghimpun masukan dalam perbaikan kinerja TPID sebagai evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan terkait dengan Evaluasi Kebijakan dapat dikatakan sudah sesuai, dan dampaknya sangat terasa. Hal ini dapat dilihat SKPD yang berada di Kabupaten Garut, semuanya melaksanakan instruksi dari Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah. Semuanya melaksanakan pasar murah selama bulan Ramadhan. Belanja Bijak selama Bulan Ramadhan juga dijalankan oleh setiap unsur. Selain itu, pelaksanaan program bantuan Pangan CPPD dalam rangka menjaga stabilitas harga dijalankan dengan baik oleh Dinas terkait. Namun tentu saja ke depan diharapkan akan banyak kebijakan yang dituangkan untuk menekan faktor inflasi. Rencana tahun depan akan ada alokasi penambahan anggaran untuk kegiatan terutama pada saat menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Dapat disimpulkan bahwa dipandang perlu adanya kerjasama diantara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menstabilkan inflasi di daerah. Perbedaan karakteristik antardaerah, apakah sebagai produsen atau daerah konsumen, ataupun perbedaan kondisi ketersediaan (surplus atau defisit) membutuhkan sinergi agar tercipta kestabilan harga di daerah tersebut, maka diharapkan ke depannya ada alokasi anggaran untuk rapat kerjasama antar daerah guna membahas mengenai inflasi.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya mencapai kestabilan harga dan mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah dan stakeholder yang terkait, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Garut telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah. Roadmap tersebut mengacu pada Roadmap Pengendalian Inflasi Nasional. Terdapat beberapa poin usulan rekomendasi pengendalian inflasi jangka pendek yang dapat ditarik kesimpulan diantaranya yaitu Pengendalian Inflasi pangan yang diarahkan pada menjaga ketersediaan pasokan pangan di pasar dalam jumlah yang memadai, mengkomunikasikan kepada publik tentang kondisi pangan pokok serta langkah antisipasinya, serta memperkuat peran Bulog dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok. Pada masa yang akan datang, terutama pada Triwulan I sangat diharapkan akan ada kebijakan yang dapat lebih mengantisipasi kemungkinan terjadinya inflasi. Pada masa yang akan datang, diharapkan akan timbul kebijakan baru yang sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya dari Surat Edaran tapi akan lahir kebijakan-kebijakan baru yang lebih dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat menekan angka inflasi.

Untuk beberapa komoditas pangan yang mengalami defisit, Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan beberapa Kebijakan, diantaranya:

1. Melaksanakan Kerjasama Antar Daerah Yang Memiliki Surplus Komoditas
2. Menggerakkan Harum Madu Untuk Cabe Merah Dan Bawah Merah Sebagai Komoditas Utama Penyebab Inflasi Untuk
3. Mempercepat Masa Tanam Padi Sebagai Upaya Mempercepat Penyediaan Komoditas Pangan Utama
4. Mapping Komoditas Per Wilayah Untuk MenSuplai Daerah Minus Dari Daerah Surplus Ketika Terjadi Kekurangan Pasokan (Permintaan Tinggi)
5. Pengaturan Pola Dan Waktu Tanam Untuk Memenuhi Komoditas Untuk Memenuhi Hari Besar Nasional